

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan serta saran yang didapat selama proses penelitian terhadap manajemen komunikasi bencana yang dilakukan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPD) Pemkot Yogyakarta terhadap bencana lahar hujan di Kali Code selama tahun 2011. Kesimpulan yang ada pada bab ini diharapkan mampu merangkum jawaban atas apa yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini. Sementara pada sub bab saran, peneliti berusaha membuktikan masukan-masukan yang bersifat konstruktif dengan berdasarkan pada hasil temuan selama masa penelitian.

#### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penyajian data dan membahas temuan-temuan yang ada, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Linmas Pemerintah Kota Yogyakarta belum berhasil menerapkan manajemen komunikasi bencana yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik melalui kerja sama kepada seluruh *stakeholders* yang ada pada jajaran pemerintah kota Yogyakarta. Hal

2. Tahapan-tahapan Dinas Penanggulangan Bencana Pemkot Yogyakarta selama melaksanakan proses manajemen komunikasi bencana lahar hujan Kali Code tahun 2011 adalah (a) Koordinasi dan perencanaan kegiatan, (b) Pembentukan manajemen tanggap bencana setiap poksi, (c) Pembentukan tugas serta kegiatan masing-masing poksi, (d) Koordinasi dengan pihak eksternal (namun terbatas), (e) Update informasi kebutuhan korban, distribusi bantuan yang diserahkan kepada pihak yang berkaitan dengan masa pasca bencana. Adanya rangkaian proses kerja yang efektif dan sistematis akan menghasilkan pelaksanaan yang mampu diharapkan oleh setiap pihak yang bertanggung jawab, sehingga kegiatan lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Tahapan pada poin nomor 2 yang dilakukan Dinas Penanggulangan Bencana Pemkot Yogyakarta tidak terlaksana dengan sendirinya. Seharusnya pengalaman kebencanaan pada tahun-tahun sebelumnya yang bermula pada kejadian erupsi Merapi dari tahun 2009, menjadikan parameter bagi pemerintah daerah setempat yang memiliki daerah rawan bencana termasuk kota Yogyakarta, agar kemudian merumuskan strategi penanggulangan bencana yang lebih baik dan efisien.
4. Sebagai tindak lanjut ke depan proses manajemen informasi yang diterapkan pemerintah kota Yogyakarta terhadap desa-desa serta kelurahan di daerah Sungai Code dengan memberikan kontribusi partisipasi untuk memudahkan



masyarakat membutuhkan seluruh bantuan dari pihak tidak terkait pemerintah saja yang bertanggung jawab. Sebab paradigma masyarakat terhadap lembaga pemerintahan masih kurang apresiatif, dan lebih cenderung mengapresiasi keberadaan gerakan maupun lembaga non pemerintah pada saat situasi bencana.

3. Dalam situasi bencana, informasi, khususnya informasi yang sangat valid dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan satu faktor yang sangat penting demi kelancaran penanggulangan bencana. Maka dari itu, bagi pihak/lembaga yang memiliki peran maupun tanggung jawab terhadap informasi pada penanggulangan bencana khususnya pemerintah kota Yogyakarta hendaknya membuat sarana penerimaan informasi berupa *Website* pribadi Dinas Penanggulangan Bencana Pemkot Yogyakarta yang sampai saat ini masih belum benar-benar memilikinya. Sehingga diharapkan masyarakat mampu mengakses informasi yang valid mengenai bencana.
4. Kekuatan media dalam penanggulangan bencana dalam kajian pemerintah khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta belum maksimal. Seharusnya Pemkot Yogyakarta mampu memaksimalkan peran media dalam penanggulangan bencana. Pemanfaatan media internet sehingga pelaksanaan penanggulangan